

Dilema Etis dan Imparsialitas Birokrasi pada Pilkada Serentak Kota Bima 2024

Rifai¹, Haeril²

^{1,2}Universitas Mbojo Bima, Jl. Piere Tendean No. 28 Mande II, Kota Bima

Corresponding Author: stisiprifai@gmail.com

Keyword:
Ethics;
Impartiality;
Bureaucracy;
Simultaneous
Elections.

Abstract: This study aims to explore the phenomenon of political pressure on Civil Servants (ASN) during the 2024 Simultaneous Regional Elections (Pilkada Serentak) in Bima City, with a focus on the ethical dilemmas that threaten the neutrality and impartiality of the bureaucracy. Although ASN are expected to act professionally and neutrally, they are often trapped in political pressures from local elites, creating a conflict between compliance with regulations and demands to support specific candidates, ultimately undermining the credibility of the bureaucracy. This research employs a qualitative descriptive method, with data collected through in-depth interviews with ASN, government officials, election monitors, and political observers, as well as participatory observations of political dynamics in Bima City. The analysis reveals that ASN frequently face significant political pressures, creating ethical dilemmas that jeopardize the integrity of the bureaucracy. These pressures, if ignored, may erode the independence of ASN, who are supposed to remain neutral. Additionally, threats to the careers of ASN who resist political pressure exacerbate the situation. The findings also indicate that a lack of understanding among ASN regarding neutrality regulations further worsens the issue, negatively impacting the quality of public services and the integrity of local democracy. This study is expected to provide insights for stronger bureaucratic reforms to support the implementation of fair and honest democratic processes in Bima City.

Kata Kunci:
Etis;
Imparsialitas;
Birokrasi;
Pilkada Serentak.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena tekanan politik terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pilkada Serentak 2024 di Kota Bima, dengan fokus pada dilema etis yang mengancam netralitas dan imparsialitas birokrasi. Meskipun ASN seharusnya profesional dan netral, mereka kerap terjebak dalam tekanan politik dari elite lokal, menciptakan konflik antara kepatuhan terhadap regulasi dan desakan untuk mendukung calon tertentu, yang pada akhirnya merusak kredibilitas birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, dengan data yang dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan ASN, pejabat pemerintahan, pengawas pemilu, dan pengamat politik, serta observasi partisipatif terhadap dinamika politik di Kota Bima. Hasil analisis menunjukkan bahwa ASN sering dihadapkan pada tekanan politik signifikan, menciptakan dilema etis dan mengancam integritas birokrasi. Tekanan ini, jika diabaikan, dapat merusak netralitas ASN yang seharusnya independen. Selain itu, ancaman terhadap karier ASN yang menolak tekanan politik semakin memperparah situasi. Hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa kurangnya pemahaman ASN terhadap regulasi netralitas semakin memperburuk kondisi, yang berdampak negatif pada kualitas pelayanan publik dan integritas demokrasi lokal. Penelitian ini diharapkan memberikan wawasan untuk reformasi birokrasi yang lebih kuat dalam mendukung pelaksanaan demokrasi yang jujur dan adil di Kota Bima.

PENDAHULUAN

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Indonesia sering kali diwarnai oleh berbagai tantangan, khususnya dalam menjaga imparsialitas birokrasi, terutama di kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) (Kernaghan, 2020); (Monteiro & Adler, 2022). Netralitas ASN menjadi salah satu isu utama yang kerap diperbincangkan dalam setiap perhelatan politik di tingkat daerah maupun nasional (Suzuki & Demircioglu, 2021);(Frans, 2022.). Pada Pilkada Serentak 2024, netralitas ASN kembali menjadi sorotan karena sejumlah masalah terkait etika dan kepentingan

politik muncul di berbagai daerah, termasuk di Kota Bima (Faedlulloh & Duadji, 2019);(Sandy, 2024).

Netralitas yang dimaksud dalam studi ini merujuk pada komitmen ASN untuk menjalankan tugas secara profesional, tidak berpihak, serta menghindari pelanggaran konflik kepentingan dalam tugasnya (Suzuki & Demircioglu, 2021);. ASN diharapkan tidak menyalahgunakan tugas, status, kekuasaan, atau jabatannya untuk keuntungan pribadi atau kelompok tertentu, terutama saat proses pemilihan umum berlangsung (Windari, 2021). Netralitas ASN penting agar proses pelayanan publik tetap berjalan dengan adil dan tidak diskriminatif (Andersen, 2021).

Namun, praktiknya menunjukkan bahwa netralitas ASN sering kali dilanggar (Pariangu, 2020). Dalam konteks Pilkada Serentak, ASN banyak yang secara terang-terangan memberikan dukungan kepada calon kepala daerah tertentu, bahkan terlibat aktif dalam mengampanyekan mereka (Syarbaini, 2019). Pelanggaran ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain tekanan dari atasan, pragmatisme kekuasaan elit ASN, dan hubungan emosional atau primordialisme antara ASN dan calon yang bersaing dalam pemilihan(Urcan, 2011) (Sandy, 2024).

Tekanan dari atasan sering kali menjadi alasan utama ASN melanggar netralitas (Tudor, n.d.); (Jusman et al, 2019). ASN yang merasa posisinya terancam jika tidak mendukung calon yang disokong oleh pimpinan politiknya cenderung terpaksa berpihak (Platon, n.d.); (Cuddon, J, 2013). Selain itu, pragmatisme kekuasaan membuat ASN memilih untuk beradaptasi dengan kekuatan politik yang sedang berkuasa, agar tetap aman dalam jabatan atau mendapatkan keuntungan di masa mendatang (Smirna, 2021).

Pentingnya penguatan sistem pencegahan pelanggaran netralitas politik melalui sosialisasi kebijakan yang lebih masif dan partisipatif (Indiahono, Satyawan, & Yamin, 2022);(Fadilah & Saepudin, 2024). Sosialisasi ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran ASN akan pentingnya menjalankan tugas dengan netral, serta meminimalkan tekanan politik yang mereka alami selama Pilkada (Peters, & Hashemi, 2022). Selain itu, sinergi antar-lembaga juga menjadi kunci dalam menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran netralitas politik di kalangan ASN (Surbakti & Nugroho, 2015). Kerjasama antara Kementerian Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan lembaga penegak hukum harus diperkuat agar tindakan tegas dapat diambil terhadap ASN yang melanggar (Sandy, 2024).

Dalam konteks profesionalisme ASN, etika memainkan peran penting dalam menjaga kredibilitas dan integritas birokrasi (Fernandes et al., 2019). Profesi ASN sebagai pelayan publik harus dijalankan dalam kerangka etika yang kuat, di mana kepentingan masyarakat ditempatkan di atas kepentingan pribadi atau kelompok (Kernaghan, 2020). ASN, sebagai bagian dari birokrasi, harus berpegang pada prinsip-prinsip dasar etika, seperti kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab (Fadilah & Saepudin, 2024).

Sebagai profesional, ASN bekerja dalam lingkungan sosio-politik yang kompleks. Mereka dihadapkan pada berbagai dilema etis ketika kepentingan politik mulai memengaruhi keputusan dan tindakan yang mereka ambil (Fernandes et al., 2019). Oleh karena itu, penting bagi ASN untuk memiliki pemahaman yang kuat tentang hak dan kewajiban etis mereka dalam menjalankan tugas (Amer et al., 2024). Dengan demikian, etika menjadi landasan penting bagi ASN dalam menghadapi tekanan politik yang sering kali terjadi saat Pilkada (Lovita & Adnan, 2021).

Dalam konteks penyelenggaraan pemilu, baik itu di tingkat nasional maupun lokal, salah satu aspek penting yang ditekankan adalah netralitas ASN (Nahtigal & Haček, 2013). International Institute for Democracy and Electoral Assistance (IDEA) mengategorikan tiga model badan penyelenggara pemilu yang berlaku di seluruh dunia: mandiri/independen, satu kesatuan dengan pemerintah, dan campuran (Suzuki & Demircioglu, 2017);(Rohr, n.d.); (Harits Anugrah, Lambali, & Nur indar, 2022). Model mandiri menekankan ketiadaan intervensi pemerintah eksekutif, sehingga badan penyelenggara dapat bekerja secara otonom (Harits Anugrah et al., 2022). Di Indonesia, sepanjang sejarah, ketiga model ini pernah diadopsi di masa yang berbeda (Nurfarhati Nurfarhati, Mukhlis Ishaka, & Haeril, 2024).

Selama Orde Baru, penyelenggara pemilu berada di bawah Kementerian Dalam Negeri, yang menunjukkan bahwa birokrasi sangat erat terhubung dengan pemerintah yang berkuasa (By, 2005); (Noer, 2024). Setelah reformasi, upaya untuk memisahkan penyelenggara pemilu dari pemerintah mulai dilakukan untuk menjamin imparialitas dalam penyelenggaraan pemilu (Jusman Iskandar et al., 2019). Namun, meskipun badan penyelenggara pemilu sekarang bersifat independen, birokrasi, khususnya ASN, tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari sistem pemilu di Indonesia (Fadilah & Saepudin, 2024).

Dilema etis yang dihadapi ASN dalam Pilkada Serentak 2024 berkaitan dengan bagaimana mereka harus menjaga netralitas di tengah situasi yang sarat dengan tekanan politik (Indiahono, 2022). Di satu sisi, ASN harus mematuhi aturan yang melarang mereka terlibat dalam politik praktis (Amer et al., 2024). Di sisi lain, mereka sering kali dihadapkan pada tekanan untuk mendukung calon tertentu demi menjaga posisi atau mendapatkan keuntungan politik di masa depan (Suzuki & Demircioglu, 2017).

Hal ini menunjukkan bahwa netralitas ASN tidak hanya merupakan masalah etika, tetapi juga masalah struktural dalam birokrasi Indonesia (Harits Anugrah et al., 2022). Hubungan erat antara politik dan birokrasi menciptakan situasi di mana ASN sering kali terjebak dalam dilema etis (Fernandes et al., 2019). Sebagai pelayan publik, ASN seharusnya independen dari pengaruh politik. Namun, dalam praktiknya, mereka sering kali dipaksa untuk memilih antara menjalankan tugas secara profesional atau menjaga hubungan baik dengan aktor politik yang memiliki kekuasaan (Nadjib, Bafadhal, & Santoso, 2022).

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang melibatkan reformasi birokrasi dan penguatan sistem pengawasan (Harits Anugrah et al., 2022). Sosialisasi tentang pentingnya netralitas dan etika harus dilakukan secara terus-menerus, tidak hanya menjelang Pilkada (Monteiro & Adler, 2022). Selain itu, perlu adanya kebijakan yang lebih tegas dalam menangani pelanggaran netralitas, termasuk memberikan sanksi yang berat bagi ASN yang terbukti melanggar (Hidayatullah, 2024).

Peningkatan kapasitas ASN dalam hal pemahaman etika dan netralitas juga sangat penting (Lynn, 2001). Pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan dapat membantu ASN mengatasi dilema etis yang mereka hadapi (Tri Haryani & Sutrisno, 2022). Dengan demikian, ASN dapat menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak tergoda untuk terlibat dalam politik praktis (Sossin, 2006).

Demikian di Kota Bima. Pada perhelatan Pilkada Serentak 2024 di Kota Bima, ASN (Aparatur Sipil Negara) menghadapi dilema etis yang kompleks, terutama dalam hal mempertahankan netralitas dan imparialitas mereka. Praktek-praktek yang menantang netralitas birokrasi sering kali muncul karena adanya tekanan politik dari berbagai pihak yang berkepentingan. ASN dihadapkan pada situasi di mana mereka diminta untuk tetap netral dalam tugas-tugas mereka, sementara pada saat yang sama terikat oleh pengaruh politik, baik

dari atasan maupun aktor politik lokal. Tantangan ini semakin diperparah dengan adanya platform digital seperti media sosial yang mempermudah ASN untuk terlibat dalam politik praktis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Fenomena ini telah menjadi perhatian utama Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), yang mencatat sejumlah laporan terkait keterlibatan ASN dalam kegiatan politik praktis. Ketidakmampuan ASN untuk memisahkan peran profesional mereka dari aktivitas politik menimbulkan ancaman serius terhadap kualitas pelayanan publik dan kepercayaan masyarakat terhadap birokrasi (Hidayatullah, 2024).

Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi fenomena tekanan politik yang dialami oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kota Bima selama Pilkada Serentak 2024, dengan fokus pada dilema etis yang mengancam netralitas dan imparialitas birokrasi. Penulis mengemukakan bahwa meskipun ASN seharusnya menjalankan tugasnya dengan profesional dan netral, kenyataannya mereka sering terjebak dalam tekanan politik yang berasal dari elite politik. Hal ini menciptakan konflik antara kepatuhan terhadap regulasi dan tekanan untuk mendukung calon tertentu, yang dapat merusak kredibilitas birokrasi. Novelty dari riset ini terletak pada analisis mendalam terhadap kerawanan netralitas ASN di tengah konteks politik lokal yang kompleks, serta dampaknya terhadap integritas demokrasi. Dengan mengidentifikasi tantangan yang dihadapi ASN, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan untuk reformasi yang mendukung pelaksanaan demokrasi yang jujur dan adil di Kota Bima.

METODOLOGI

Metode penelitian yang diterapkan dalam studi ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif, yang bertujuan mengungkap fenomena tekanan politik terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam Pilkada Serentak 2024 di Kota Bima. Penelitian ini mencakup studi literatur untuk menganalisis berbagai sumber sekunder, termasuk peraturan terkait netralitas ASN, laporan dari Bawaslu, serta hasil penelitian sebelumnya. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dengan informan kunci seperti ASN, pejabat pemerintahan, pengawas pemilu, dan pengamat politik, disertai dengan observasi partisipatif terhadap situasi birokrasi dan dinamika politik di Kota Bima sepanjang proses Pilkada. Data dianalisis menggunakan model analisis interaktif Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga tahapan utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Dalam tahap reduksi data, peneliti memilah dan menyaring informasi yang relevan dari hasil wawancara dan dokumen yang dikumpulkan, kemudian mengkodekan wawancara untuk mengidentifikasi tema dan pola utama. Hasil reduksi data ini disajikan secara sistematis untuk mempermudah pemahaman pola yang ada, yang kemudian diinterpretasikan dalam proses penarikan kesimpulan. Dengan proses ini, peneliti berupaya mendalami dilema etis serta tantangan imparialitas ASN dalam menjaga netralitas di tengah tekanan politik yang mereka hadapi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pilkada Serentak 2024 di Kota Bima menjadi salah satu momen krusial yang menyoroti peran Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjaga netralitas dan imparialitas birokrasi. ASN sebagai pelayan publik seharusnya menjunjung tinggi prinsip netralitas, tidak berpihak, dan menjaga profesionalisme dalam menjalankan tugasnya (Nahtigal & Haček, 2013)(Fadilah & Saepudin, 2024);(Pedersen & Johannsen, 2016); (Peters et al., 2022). Namun, dalam praktiknya, netralitas ASN seringkali berada di bawah tekanan politik (Surbakti & Nugroho, 2015). Tekanan tersebut bisa datang dari berbagai pihak, terutama elite politik yang memiliki kepentingan tertentu dalam pemilihan kepala daerah (Fernandes et al., 2019); (Lovita & Adnan, 2021).

Imparsialitas birokrasi sangat penting untuk menjaga integritas demokrasi, namun kenyataan di lapangan menunjukkan dilema etis yang kerap dihadapi oleh ASN (Suzuki & Demircioglu, 2017); (Amer et al., 2024). Mereka dihadapkan pada pilihan sulit antara menjalankan tugas sesuai regulasi atau memenuhi tekanan dari atasan yang terlibat dalam politik praktis (Caron & Giauque, 2006); (Staronova & Rybář, 2021) (Harits Anugrah et al., 2022). Tekanan politik ini sering kali mengarah pada keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang pada akhirnya merusak kredibilitas birokrasi (Rohr, n.d.); (Pedersen & Johannsen, 2016); (Brans, Pelgrims, & Hoet, 2005); (Grube, 2017); (Veit & Vedder, 2023).

Pembahasan ini bertujuan untuk menggali lebih dalam fenomena tekanan politik terhadap ASN dalam Pilkada Serentak 2024 di Kota Bima, serta bagaimana dilema etis dan tantangan menjaga imparsialitas birokrasi mempengaruhi pelaksanaan demokrasi yang jujur dan adil.

Tekanan Politik terhadap ASN

Tekanan politik terhadap Aparatur Sipil Negara (ASN) selama Pilkada sering muncul dari keterlibatan elite politik yang berusaha mempengaruhi keputusan dan tindakan ASN demi kepentingan politik praktis (Christensen & Opstrup, 2018); (Noer, 2024). ASN, yang dalam teori berfungsi sebagai birokrasi netral dan profesional, sering kali menjadi sasaran tekanan politik yang dapat mempengaruhi integritas birokrasi (Eichbaum & Shaw, 2008). Birokrasi pada dasarnya berbeda dari organisasi politik dan sektor swasta (Persson & Goldkuhl, 2010). ASN diharapkan bersikap netral dalam menjalankan tugas-tugas publik, di mana promosi dan karier mereka sangat bergantung pada senioritas, serta memiliki jaminan pekerjaan yang stabil sampai usia pensiun yang ditentukan (Spiller & Urbiztondo, 1994); (Park & Han, 2018); (Nurfarhati Nurfarhati et al., 2024).

Namun, dalam konteks Pilkada, ASN sering dihadapkan pada dilema karena tekanan dari pejabat atau atasan politik yang memiliki kepentingan dalam memenangkan calon tertentu. Tekanan ini dapat datang dalam bentuk arahan tidak langsung, permintaan dukungan secara terselubung, atau bahkan instruksi untuk terlibat dalam kampanye (Sossin, 2006). ASN yang gagal menjaga netralitasnya bisa terlibat dalam kegiatan politik, seperti menghadiri kampanye atau menggunakan pengaruh jabatannya untuk mendukung calon yang didukung oleh elite politik (Noer, 2024).

ASN yang berada dalam situasi di mana mereka tidak memiliki peluang untuk mencapai posisi puncak dalam birokrasi sebelum pensiun cenderung kurang efektif dalam menjalankan tugasnya (Tri Haryani & Sutrisno, 2022). Tekanan politik juga seringkali menempatkan ASN dalam posisi sulit, di mana mereka harus memilih antara melawan tekanan politik dan menjaga karier mereka, atau tunduk pada tekanan tersebut demi keamanan pekerjaan dan promosi (Lynn, 2001); (Hidayatullah, 2024). Kondisi ini merusak prinsip dasar birokrasi yang seharusnya netral dan profesional (Monteiro & Adler, 2022). Dengan demikian, reformasi dan pengawasan yang ketat diperlukan untuk menjaga imparsialitas ASN, terutama dalam menghadapi Pilkada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pilkada Serentak 2024 di Kota Bima menempatkan birokrasi, terutama Aparatur Sipil Negara (ASN), dalam posisi yang sangat krusial. Sebagai tulang punggung administrasi negara, ASN diharapkan untuk tetap netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa tekanan politik sering kali menghalangi ASN untuk menjaga netralitas tersebut. Tekanan ini datang dari berbagai sumber, mulai dari pejabat politik hingga lingkungan sekitar yang mendesak mereka untuk mendukung calon tertentu.

Tekanan politik terhadap ASN selama proses Pilkada seringkali berkaitan dengan mobilisasi mereka sebagai basis dukungan politik. Di Kota Bima, situasi ini semakin memburuk seiring dengan mendekatnya hari pemungutan suara, di mana ASN dihadapkan pada dilema: tetap netral atau memenuhi tuntutan politik dari atasan atau kelompok tertentu. Salah satu bentuk tekanan yang umum dialami ASN adalah permintaan untuk mendukung calon yang diusung oleh partai tertentu, sering kali disertai dengan ancaman, baik secara langsung maupun

tidak langsung, yang dapat memengaruhi karier dan posisi mereka di dalam birokrasi. Hal ini menciptakan ketakutan di kalangan ASN, di mana netralitas mereka dapat dianggap sebagai bentuk pembangkangan, berpotensi mendatangkan konsekuensi serius seperti pemindahan tugas, pengabaian promosi, atau bahkan pemecatan.

Regulasi yang mengatur netralitas ASN, seperti Undang-Undang Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 dan UU ASN Nomor 20 Tahun 2023, serta Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 94 Tahun 2021 dan Surat Edaran Walikota Bima Nomor 317 Tahun 2024, secara tegas melarang keterlibatan ASN dalam kegiatan kampanye dan penggunaan fasilitas negara untuk kepentingan politik. Kendati demikian, tekanan politik tetap ada. Beberapa laporan dari Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Bima mengidentifikasi keterlibatan ASN dalam kegiatan deklarasi dan pendaftaran pasangan calon wali kota, yang mengharuskan Bawaslu untuk menegur dan memulangkan ASN yang terlibat dalam acara politik tersebut.

Kebingungan di kalangan ASN mengenai batasan peran mereka dalam Pilkada muncul karena sebagian dari mereka mengklaim tidak mengetahui aturan yang melarang keterlibatan tersebut, terutama ketika calon yang mereka dukung belum resmi ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). Situasi ini mencerminkan kurangnya pemahaman tentang regulasi yang berlaku, serta tekanan politik yang membuat mereka merasa terpaksa terlibat.

Tekanan politik terhadap ASN dalam konteks Pilkada Serentak Kota Bima 2024 menimbulkan kerawanan etis dan imparialitas dalam birokrasi. Berdasarkan Indeks Kerawanan Netralitas ASN, NTB, termasuk Kota Bima, berada dalam lima besar tingkat kerawanan di Indonesia. Keadaan ini menjadi perhatian serius bagi Bawaslu, yang menekankan pentingnya langkah pencegahan untuk meminimalkan pelanggaran netralitas (Monteiro & Adler, 2022). Praktik nepotisme juga diyakini sebagai salah satu penyebab utama menurunnya netralitas ASN di NTB. Bawaslu NTB menegaskan bahwa tantangan tidak hanya terletak pada penanganan pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga pada pencegahan pelanggaran di masa mendatang. Kode etik dan peraturan yang mengatur ASN harus dipegang teguh sebagai pedoman pelaksanaan tugas, termasuk larangan bagi ASN untuk terlibat dalam politik praktis, yang jika dilanggar dapat berakibat fatal bagi individu ASN serta integritas institusi pemerintah secara keseluruhan (Nadjib et al., 2022).

Dari perspektif kerawanan, dampak terburuk dari tekanan politik ini adalah perpecahan dalam tubuh birokrasi (Harits Anugrah et al., 2022). Situasi di mana ASN terpaksa memilih pihak dalam kontestasi politik dapat menciptakan ketidakpercayaan dan friksi antara rekan-rekan ASN, sehingga mengakibatkan lingkungan kerja yang tidak kondusif. Dalam konteks ini, ASN mungkin merasa tertekan untuk mendukung calon tertentu meskipun bertentangan dengan nilai-nilai netralitas dan profesionalisme yang seharusnya dijunjung tinggi (Indiahono, 2022).

Bawaslu Kota Bima, mengonfirmasi bahwa saat ini terdapat 12 kasus pelanggaran yang sedang ditangani, mencerminkan betapa seriusnya situasi ini. Bawaslu berharap Penjabat Wali Kota Bima, dapat berperan sebagai wasit dalam menjaga netralitas ASN selama Pilkada. Penandatanganan Pakta Integritas terkait netralitas ASN diharapkan memberikan kepastian hukum dan etis bagi ASN dalam menjalankan tugas mereka. Namun, tindakan pencegahan dan penegakan disiplin yang dijanjikan pemerintah harus diimbangi dengan pendekatan yang adil dan transparan. ASN yang berani mengambil posisi netral di tengah tekanan politik sering kali menghadapi konsekuensi berat, termasuk ancaman pemecatan atau penurunan jabatan. Ketidakpastian perlindungan hukum bagi ASN yang bersikap netral dapat menjadi faktor penghambat yang memperburuk situasi ini.

Tekanan politik yang terus-menerus dapat memperburuk moral dan motivasi ASN. Ketika ASN merasa pekerjaan mereka dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tidak adil, motivasi mereka untuk melayani publik secara optimal menurun, berdampak langsung pada kualitas layanan publik yang seharusnya menjadi prioritas. Selain itu, perpecahan di kalangan ASN dapat menciptakan dampak jangka panjang yang merugikan bagi integritas birokrasi dan kepercayaan

publik terhadap pemerintah. Jika publik melihat ASN sebagai entitas yang dipolitisasi, ini dapat merusak citra pemerintah dan menciptakan skeptisisme terhadap kemampuan birokrasi dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Oleh karena itu, upaya untuk meminimalkan tekanan politik dan menjaga netralitas ASN harus menjadi prioritas utama, tidak hanya untuk kelancaran Pilkada, tetapi juga untuk keutuhan dan efektivitas birokrasi di masa depan.

Pemerintah Kota Bima telah mengambil tindakan tegas terhadap ASN yang melanggar komitmen netralitas, menunjukkan niat untuk menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan mengurangi kemungkinan perpecahan di kalangan ASN. Keberhasilan upaya ini bergantung pada komitmen semua pihak untuk menjaga integritas dan profesionalisme dalam pelayanan publik, serta memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil dalam konteks Pilkada tidak mengorbankan nilai-nilai etis yang seharusnya dipegang oleh ASN.

Kondisi ini memperlihatkan bahwa birokrasi, meskipun seharusnya netral, kerap menjadi korban dari sistem politik yang menuntut loyalitas (Kernaghan, 2000). ASN dihadapkan pada dua pilihan yang sulit: menjalankan tugas dan fungsi mereka secara profesional sesuai dengan aturan yang berlaku, atau menghadapi realitas politik di mana loyalitas menjadi kunci untuk mempertahankan posisi dan karier dalam birokrasi (Suzuki & Demircioglu, 2021). Dalam konteks reformasi birokrasi, muncul pertanyaan besar tentang bagaimana netralitas ASN dapat dipertahankan dalam iklim politik yang sangat kompetitif seperti Pilkada. Beberapa kasus reformasi birokrasi di negara Eropa menunjukkan bahwa keberhasilan reformasi sangat bergantung pada kemampuan pemerintah untuk menciptakan sistem yang transparan dan berintegritas. Namun, di banyak negara berkembang, termasuk Indonesia, reformasi birokrasi masih terhambat oleh budaya patronase dan tekanan politik yang kuat.

Studi terkait ASN dalam Pilkada di beberapa negara berkembang, seperti Ghana dan Republik Dominika, menunjukkan bahwa perekrutan ASN berdasarkan meritokrasi dapat membantu mengurangi korupsi dan meningkatkan motivasi kerja mereka (Suzuki & Demircioglu, 2021); (Urcan, 2011). Namun, stabilitas pekerjaan justru dapat memperkuat keterlibatan ASN dalam politik, terutama dalam mobilisasi pemilih (Kernaghan, 2000). ASN dengan jaminan stabilitas pekerjaan cenderung lebih mudah dimobilisasi untuk mendukung partai politik atau calon tertentu, terutama jika mereka merasa aman dari ancaman kehilangan pekerjaan. Situasi ini juga relevan di Kota Bima, di mana banyak ASN merasa aman dalam posisi mereka, sehingga merasa lebih mudah untuk terlibat dalam kegiatan politik meskipun menyadari bahwa hal tersebut melanggar aturan. Lemahnya pengawasan dan penegakan aturan terhadap ASN yang terlibat dalam politik praktis juga memperburuk kondisi ini.

Untuk menjaga netralitas ASN di Pilkada Kota Bima 2024, diperlukan langkah-langkah yang lebih tegas dan sistematis. Pertama, penguatan regulasi terkait netralitas ASN dan penegakan hukuman bagi pelanggar harus dilakukan. Kedua, penting untuk meningkatkan pemahaman ASN tentang regulasi yang mengatur peran mereka dalam Pilkada, agar tidak ada kebingungan mengenai batasan keterlibatan mereka. Ketiga, pengawasan terhadap ASN perlu diperketat oleh Bawaslu dan Komisi ASN untuk memastikan netralitas tetap terjaga. Selain itu, pemerintah harus menciptakan iklim politik yang kondusif bagi ASN untuk tetap netral, dengan meminimalkan tekanan politik dari pejabat politik dan partai agar ASN dapat menjalankan tugas mereka tanpa gangguan. Upaya ini juga harus didukung oleh publik dan masyarakat sipil untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik bagi ASN dalam menjalankan peran mereka.

Imparsialitas Birokrasi

Imparsialitas birokrasi di Indonesia mengacu pada prinsip bahwa pegawai negeri sipil (PNS) harus bertindak netral, tanpa keberpihakan pada kelompok politik atau kepentingan tertentu, demi menjaga integritas dan kepercayaan public (Suzuki & Demircioglu, 2021). Namun, tantangan utama bagi imparsialitas ini adalah adanya tekanan politik yang sering kali memaksa ASN untuk berpihak pada kepentingan tertentu, terutama menjelang pemilihan umum (Cuddon, J, 2013). Teori birokrasi representatif menyatakan bahwa keberadaan PNS dari

kelompok minoritas dapat membantu memperjuangkan kepentingan warga minoritas, tetapi di Indonesia, variabel seperti insentif dan risiko terkait representasi tersebut kurang mendapat perhatian (Indiahono et al., 2022). Meskipun teori birokrasi Weberian berargumen bahwa birokrasi yang baik dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penelitian menunjukkan bahwa hubungan ini mungkin terlalu dilebih-lebihkan, terutama di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Selain itu, faktor-faktor seperti tekanan politik dan risiko internal organisasi masih menjadi hambatan signifikan dalam menciptakan birokrasi yang benar-benar imparisial dan efektif (Platon, n.d.).

Hasil Penelitian menunjukkan Penelitian menunjukkan bahwa karakteristik birokrasi, seperti representativitas dan profesionalisme, memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat. Banyak riset menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan warga terhadap birokrasi lebih tinggi ketika terdapat sistem administrasi publik yang imparisial dan representatif. Namun, dalam konteks Kota Bima, tantangan ini semakin diperparah dengan kurangnya insentif bagi PNS untuk bertindak netral, terutama dalam periode pemilu di mana kepentingan politik sangat mengemuka. Dalam analisis data, terlihat bahwa jika PNS di Kota Bima tidak mampu menjalankan imparisialitas dengan baik, efek jangka panjangnya bisa sangat merugikan. Hal ini dapat mengarah pada kegagalan sistem pemerintahan, meningkatnya korupsi, dan berkurangnya partisipasi publik dalam proses politik.

Sebagai analoginya sebuah studi mengenai praktik penegakan hukum di Amerika Serikat menunjukkan bahwa walaupun petugas penegakan hukum dari kelompok minoritas tidak memperlakukan komunitas mereka secara preferensial, mereka mampu mengurangi disparitas rasial dalam penegakan hukum. Fenomena ini menunjukkan bahwa imparisialitas dapat dicapai melalui perilaku birokrasi yang tidak terikat pada kepentingan politik. Dengan demikian, jika imparisialitas birokrasi tidak dijaga, hasilnya dapat menciptakan ketidakadilan dalam pengambilan keputusan publik, di mana keputusan diambil berdasarkan kepentingan politik daripada kepentingan masyarakat luas.

Dalam konteks Kota Bima, kehadiran PNS yang berfungsi sebagai perwakilan masyarakat yang beragam adalah langkah penting menuju peningkatan imparisialitas. Namun, riset juga menunjukkan bahwa karakteristik birokrasi yang berbeda di berbagai negara mempengaruhi tingkat kepercayaan publik. Di Bima, jika PNS gagal dalam menjalankan prinsip ini, maka kepercayaan masyarakat akan menurun, yang selanjutnya berimplikasi pada legitimasi pemerintah. Penurunan kepercayaan ini dapat menyebabkan masyarakat merasa apatis dan skeptis terhadap proses politik, yang berujung pada rendahnya partisipasi dalam pemilihan umum.

Seiring berjalannya waktu, konsekuensi dari kurangnya imparisialitas birokrasi dapat menjadi lebih serius. Penelitian menunjukkan bahwa birokrasi yang tidak imparisial dapat memicu korupsi politik, di mana PNS terlibat dalam praktik kolusi dengan politisi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Hal ini sesuai dengan definisi korupsi yang menganggapnya sebagai pelanggaran norma imparisialitas. Jika kondisi ini dibiarkan, maka akan terjadi penggerusan kepercayaan publik yang lebih dalam, yang dapat menyebabkan ketidakstabilan politik. Masyarakat yang kehilangan kepercayaan terhadap pemerintah cenderung menjadi lebih kritis, dan ini dapat memperburuk situasi sosial dan politik di daerah tersebut.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah di Kota Bima untuk memperkuat prinsip imparisialitas dalam birokrasi mereka, terutama menjelang Pilkada Serentak 2024. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan penguatan kode etik bagi PNS, serta penerapan sistem pengawasan yang ketat untuk mencegah penyalahgunaan wewenang. Selain itu, partisipasi publik dalam proses pengambilan keputusan juga harus didorong untuk memastikan bahwa suara masyarakat didengar dan diakomodasi dalam kebijakan yang diambil. Dengan memperkuat imparisialitas birokrasi, pemerintah dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada stabilitas dan kemajuan daerah.

Dengan demikian, bahwa imparialitas birokrasi di Kota Bima memiliki implikasi yang luas terhadap proses politik dan perkembangan sosial ekonomi. Jika prinsip ini tidak ditegakkan dengan baik, maka risiko kegagalan birokrasi akan meningkat, yang dapat mengakibatkan efek jangka panjang yang merugikan, termasuk korupsi, penurunan partisipasi politik, dan ketidakstabilan sosial. Untuk itu, langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memastikan bahwa PNS dapat berfungsi sebagai pelayan publik yang benar-benar netral, demi kepentingan masyarakat dan kemajuan daerah.

KESIMPULAN

Bahwa situasi politik yang kompleks menjadikan Aparatur Sipil Negara (ASN) berada dalam posisi sulit, di mana mereka dihadapkan pada tekanan politik yang signifikan dari elite politik untuk berpihak pada calon tertentu. Meskipun ASN seharusnya menjunjung tinggi netralitas dan profesionalisme, dalam praktiknya, mereka sering kali terpaksa terlibat dalam kegiatan politik, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tekanan ini menciptakan dilema etis yang merusak integritas birokrasi dan mengakibatkan ketidakpastian mengenai batasan peran ASN dalam pemilihan umum. Hasil penelitian juga mengindikasikan bahwa adanya ancaman terhadap karier ASN yang menolak untuk mematuhi tekanan politik menambah kompleksitas situasi. Data menunjukkan bahwa netralitas ASN terancam oleh tekanan yang berasal dari pejabat politik dan rekan sejawat, sehingga merusak prinsip dasar birokrasi yang seharusnya independen dan berfungsi sebagai pelayan publik. Selain itu, rendahnya pemahaman ASN tentang regulasi terkait netralitas memperburuk masalah ini, yang berdampak pada kualitas pelayanan publik.

REFERENSI

- Amer, N., Fahmi Lubis, A., Hidayat Muhtar, M., Jillyan Edsti Saija, V., Suciani Putri, V., & Setiawan, B. (2024). *Implications of the Constitution for Political Neutrality in the Dynamics of Law and Democracy*. 10(2), 283–302. Retrieved from <https://doi.org/10.31004/cdj.v4i4.19099>.
- Andersen, D. (2021). *Cover sheet*. (September 2020).
- Brans, M., Pelgrims, C., & Hoet, D. (2005). Politico-administrative relations under coalition governments: the case of Belgium. In *Coalitions of the unwilling? Politicians and civil servants in coalition governments*.
- By, C. C. (2005). *The value of the dichotomy*.
- Caron, D. J., & Giauque, D. (2006). Civil servant identity at the crossroads: New challenges for public administrations. *International Journal of Public Sector Management*, 19(6), 543–555. <https://doi.org/10.1108/09513550610685989>
- Christensen, J. G., & Opstrup, N. (2018). Bureaucratic dilemmas: Civil servants between political responsiveness and normative constraints. *Governance*, 31(3), 481–498. <https://doi.org/10.1111/gove.12312>
- Cuddon, J. A. (2013). *Literary Terms and Literary Theory*.
- Eichbaum, C., & Shaw, R. (2008). Revisiting politicization: Political advisers and public servants in westminster systems. *Governance*, 21(3), 337–363. <https://doi.org/10.1111/j.1468-0491.2008.00403.x>
- Fadilah, U., & Saepudin, E. A. (2024). Profesi birokrasi hukum pemerintahan dalam etika pelayanan publik. *RESJUSTITIA: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 253–265. Retrieved from resjustitia.lppmbinabangsa.id
- Faedlulloh, D., & Duadji, N. (2019). Birokrasi dan Hoax: Studi Upaya Menjaga Netralitas Aparatur Sipil Negara di Era Post-Truth. *Jurnal Borneo Administrator*, 15(3), 313–332. <https://doi.org/10.24258/jba.v15i3.566>

- Fernandes, A., Mellaz, A., Riza, F., Siregar, F. E., Hurriyah, Sandi, I. D. K. W. R., ... Wahyu, Y. (2019). Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019. *Perihal Penyelenggaraan Kampanye*, 203.
- From_Political_Neutrality_to_Political_W.pdf*. (n.d.).
- Grube, D. C. (2017). Civil servants, political history, and the interpretation of traditions. *Historical Journal*, 60(1), 173–196. <https://doi.org/10.1017/S0018246X15000527>
- Harits Anugrah, E., Lambali, S., & Nur indar, I. (2022). Bureaucracy Neutrality In The 2018 Regional Head Election In Indonesia Case Study In Makassar City. *Journal of Positive School Psychology*, 2022(7), 4784–4790. Retrieved from <http://journalppw.com>
- Hidayatullah, A. (2024). *The Challenge of Bureaucratic Neutrality in the 2024 Legislative and Presidential Elections in Indonesia*. 05(1), 135–148.
- Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah, K., & Syarbaini, S. (2019). JIP (JURNAL ILMU PEMERINTAHAN): The Neutrality of State Civil Apparatus in Local Election: a Case Study of South Sulawesi Provincial Election in 2018 Netralitas Aparatur Sipil Negara dalam Pilkada : Studi Kasus Pilkada Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2018. *Governmentjournal.Org*, 4(2), 104–118. Retrieved from <http://governmentjournal.org/index.php/jip>
- Indiahono, D. (2022). Bureaucratic Neutrality Index in Direct Regional Head Elections: Optimism in Developing Professional Bureaucracy in Indonesia. *Public Policy and Administration*, 21(3), 249–261. <https://doi.org/10.5755/j01.ppa.21.3.31788>
- Indiahono, D., Satyawan, D. S., & Yamin, M. (2022). Understanding Sowan as a New Paternalistic Bureaucracy Pattern of Local Officials in Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 14(2), 201–211. <https://doi.org/10.21787/jbp.14.2022.201-211>
- Jusman Iskandar, Alfiah, Amalia Nur Fajriah, Anggun Dwi Rahmawati, & Anisa Sofiani. (2019). Etika Birokrat Dalam Pelayanan Publik. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*, 18(3), 1–10. <https://doi.org/10.54783/dialektika.v18i3.69>
- Kernaghan, K. (2000). The post-bureaucratic organization and public service values. *International Review of Administrative Sciences*, 66(1), 91–104. <https://doi.org/10.1177/0020852300661008>
- Lovita, A. J., & Adnan, M. F. (2021). Implementasi Prinsip Transparansi Dan Imparsialitas Dalam Pelaksanaan Pilkada Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Siak, Riau. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(4), 1076–1085. <https://doi.org/10.58258/jisip.v5i4.2425>
- Lynn, L. E. (2001). The myth of the bureaucratic paradigm: What traditional public administration really stood for. *Public Administration Review*, 61(2), 144–160. <https://doi.org/10.1111/0033-3352.00016>
- Monteiro, P., & Adler, P. S. (2022). Bureaucracy for the 21st Century: Clarifying and Expanding Our View of Bureaucratic Organization. *Academy of Management Annals*, 16(2), 427–475. <https://doi.org/10.5465/annals.2019.0059>
- Nadjib, A., Bafadhal, O. M., & Santoso, A. D. (2022). Social Capital, Bureaucratic Neutrality, and Regional Head Election in Indonesia. *Studia Regionalne i Lokalne*, 87(1), 37–50. <https://doi.org/10.7366/1509499518703>
- Nahtigal, L., & Haček, M. (2013). Politicization Of Senior Civil Servants In Slovenia Lea NAHTIGAL Miro HAČEK. *Transylvanian Review of Administrative Sciences*, (39), 108–127.
- Noer, H. H. (2024). Portrait of the Politicization of Indonesian Bureaucracy in the 2024 Election. *International Journal of Social Service and Research*, 4(03), 752–769. <https://doi.org/10.46799/ijssr.v4i03.735>
- Nurfarhati Nurfarhati, Mukhlis Ishaka, & Haeril Haeril. (2024). Etika Deontologis dan Kebajikan: Fondasi Meningkatkan Akuntabilitas Birokrasi. *Public Service and Governance Journal*, 5(2), 38–51. <https://doi.org/10.56444/psgj.v5i2.1472>
- Pariangu, U. T. (2020). Netralitas Aparatur Sipil Negara Dan Biopatologi Dalam Pemilihan Kepala Daerah. *Journal Publicuho*, 3(4), 470. <https://doi.org/10.35817/jpu.v3i4.15375>
- Park, C. O., & Han, S. (2018). Bureaucratic responses to the cross pressures of political neutrality

- in relation to cultural orientation and role perception: The case of Korean civil servants. *Korean Journal of Policy Studies*, 33(3), 47–71. <https://doi.org/10.52372/kjps33303>
- Pedersen, K. H., & Johannsen, L. (2016). Where and How You Sit: How Civil Servants View Citizens' Participation. *Administration and Society*, 48(1), 104–129. <https://doi.org/10.1177/0095399714555753>
- Persson, A., & Goldkuhl, G. (2010). Government value paradigms-bureaucracy, new public management, and e-government. *Communications of the Association for Information Systems*, 27(1), 45–62. <https://doi.org/10.17705/1cais.02704>
- Peters, B. G., Danaeefard, H., Ahmadzahi Torshab, A., Mostafazadeh, M., & Hashemi, M. (2022). Consequences of a politicized public service system: Perspectives of politicians, public servants, and political experts. *Politics and Policy*, 50(1), 33–58. <https://doi.org/10.1111/polp.12447>
- Platon, M. (n.d.). *ETICA ȘI ETICHETA FUNCȚIONARULUI PUBLIC (II)**. (li).
- Rohr, J. A. (n.d.). *Civi I Servants and Their Constitutions*.
- Sandy, M. A. (2024). *Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Netralitas Aparatur Sipil Negara Dalam Pilkada Serentak 2020 Di Sumatera Barat*. 7(1), 255–269. Retrieved from [http://scholar.unand.ac.id/463894/%0Ahttp://scholar.unand.ac.id/463894/2/TESES BAB I FIX.pdf](http://scholar.unand.ac.id/463894/%0Ahttp://scholar.unand.ac.id/463894/2/TESES%20BAB%20I%20FIX.pdf)
- Smirna, T. (2021). The New Deal was no deal. *Revista Procesos De Mercado*, VII, 37–88. <https://doi.org/10.52195/pm.v7i2.272>
- Sossin, L. (2006). Defining Boundaries: The Constitutional Argument for Bureaucratic Independence and its Implication for the Accountability of the Public Service. *Commission of Inquiry to the Sponsorship Program and Advertising Activities, Restoring Accountability, Research Studies*, 2, 25–72.
- Spiller, P. T., & Urbiztondo, S. (1994). Political appointees vs. career civil servants: A multiple principals theory of political bureaucracies. *European Journal of Political Economy*, 10(3), 465–497. [https://doi.org/10.1016/0176-2680\(94\)90005-1](https://doi.org/10.1016/0176-2680(94)90005-1)
- Staronova, K., & Rybář, M. (2021). Personal or Party Roots of Civil Service Patronage? Ministerial Change Effects on the Appointments of Top Civil Servants. *Administration and Society*, 53(5), 651–679. <https://doi.org/10.1177/0095399720956996>
- Surbakti, R., & Nugroho, K. (2015). *Studi Tentang Desain Kelembagaan Pemilu Yang Efektif, Kemitraan Bagi Pembaruan Tata Pemerintahan*. 72–73. Retrieved from <https://www.neliti.com/publications/45222/studi-tentang-desain-kelembagaan-pemilu-yang-efektif>
- Suzuki, K., & Demircioglu, M. A. (2017). *Rediscovering bureaucracy*. (July).
- Suzuki, K., & Demircioglu, M. A. (2021). Is impartiality enough? Government impartiality and citizens' perceptions of public service quality. *Governance*, 34(3), 727–764. <https://doi.org/10.1111/gove.12527>
- Tri Haryani, A., & Sutrisno, B. H. (2022). the Importance of the Neutrality of the State Civil Apparatus As the Effort To Realize Quality Elections. *International Journal of Scientific & Engineering Research*, 13(10), 790–796. Retrieved from <http://www.ijser.org>
- Tudor, V. (n.d.). *Termenul rezonabil de informare a mediatorului cu privire la elementele semnificative ale cazului penal dedus medierii for mediation*. 1, 41–45.
- Urcan, N. T. (2011). *Din Republica Moldova*. 8(8), 206–212.
- Veit, S., & Vedder, S. (2023). Measuring civil service politicization with career data: Backstage and frontstage political experience of top civil servants in the German ministerial administration. *Public Administration*, (October), 1119–1136. <https://doi.org/10.1111/padm.12967>
- Windari, T. (2021). Journal of International Women ' s Studies. *National Identity Attachment and Its Variables*, 22(2021), 21–22.